

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan menurut (PP Nomor 58, tahun 2005) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Untuk melihat baik tidaknya pengelolaan keuangan daerah suatu pemerintahan dapat dilihat dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, telah terjadi pelimpahan wewenang yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (clean government), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengendalikan kebijakan ekonomi daerah secara ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Mardiasmo (2002:35) menyatakan bahwa sistem akuntabilitas keuangan suatu lembaga dapat berjalan dengan baik jika terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik.

Untuk menciptakan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya sistem pengelolaan keuangan yang sehat. Dalam Hidayat (2015), Abdul mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah itu sendiri mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam menunjukkan kualitas pengelolaan keuangannya. Di satu sisi, Intellectual capital juga berperan

dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, bahkan secara langsung akan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menilai kemampuan kerja. Dalam Resource-Based Theory disimpulkan bahwa Intellectual Capital (IC) memenuhi kriteria sebagai sumber daya yang unik yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dapat menciptakan nilai bagi perusahaan dan dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik (Wijayani, 2017; Nuraini et al., 2019).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006, keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri yang dapat dinilai secara moneter, termasuk berbagai bentuk kekayaan yang erat kaitannya dengan kewajiban dan hak daerah. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran yang bercirikan definisi, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi untuk pelaksanaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah haruslah terlaksana secara transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tertib, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Intellectual capital atau modal intelektual adalah suatu aset yang tidak terwujud yang dapat memberikan sumber daya berbasis pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan bersaing serta memberikan nilai dibanding perusahaan lain. Intellectual capital dapat dipandang sebagai pengetahuan dalam pembentukan kekayaan intelektual dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan perusahaan. Intellectual capital dapat dipandang sebagai pengetahuan dalam pembentukan kekayaan intelektual dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan perusahaan. Intellectual capital tidak hanya

berupa goodwill ataupun paten seperti yang sering dilaporkan dalam neraca. Kompetensi karyawan, hubungan dengan pelanggan, penciptaan inovasi, sistem komputer dan administrasi, hingga kemampuan atas penguasaan teknologi juga merupakan bagian dari intellectual capital.

Kapabilitas artinya juga sama dengan Kompetensi, yaitu Kemampuan. Namun pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya. Kemampuan yang memiliki lebih dari hanya keterampilan pada suatu hal yang menjadi keunggulan bersaing dan menguasai kemampuan dari titik kelemahan. Aspek kapabilitas kerja juga berperan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Widodo dalam Wahyudi dan Assegaf (2011) memaparkan dasar penting untuk menghasilkan daya saing perusahaan adalah kombinasi dari sumber daya yang unik dan kemampuan yang terikat dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, adanya kewenangan yang dimiliki oleh pegawai akan membantu dalam mewujudkan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indrawati, dkk (2019), Siska Yulia Defitri (2018), Sembiring, dkk (2021). Diketahui bahwa ada penelitian yang dilakukan oleh Indrawati, dkk (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa modal intelektual berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja pegawai. Apabila modal intelektual meningkat maka produktivitas kerja pegawai juga meningkat dan sebaliknya jika modal intelektual menurun maka produktivitas juga ikut menurun. Pada penelitian yang dilakukan oleh Siska Yulia Defitri (2018) Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka laporan keuangan yang dihasilkan juga

akan semakin meningkat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sembiring, dkk (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai kemampuan kerja berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, kemampuan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, kepuasan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara tidak langsung, kepuasan kerja tidak bersifat memediasi hubungan antara variabel motivasi dengan variabel kinerja pegawai.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mojokerto karena Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah di kabupaten Mojokerto sering mengikuti seminar- seminar di berbagai kabupaten untuk mengetahui dan mempelajari system pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat mengharapkan adanya penyediaan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dalam mewujudkan tiga pilar pengelolaan keuangan daerah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melaksanakan pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini dilakukan sebab belum optimalnya kinerja pegawai yang dibuktikan dengan adanya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta masih relatif rendahnya kemampuan dalam mengaplikasikan sistem informasi manajemen dan penguasaan informasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Permasalahn tersebut diakibatkan oleh belum optimalnya modal intelektual yang dimiliki serta belum optimalnya komitmen organisasi. Serta terdapat sedikit kendala dalam melakukan pengelolaan keuangannya dan pemahaman dalam SIPD (system informasi pemerintahan daerah) maka peneliti ingin mengetahui sistem pengelolaan keuangan daerah dan modal intelektual di Kabupaten Mojokerto.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah system pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah intellectual capital berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kapabilitas kerja?
4. Apakah intellectual capital berpengaruh terhadap kapabilitas kerja?
5. Apakah kapabilitas kerja berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah?
6. Apakah system pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan kapabilitas kerja sebagai variabel mediasi?
7. Apakah intellectual capital berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan kapabilitas kerja sebagai variabel mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hasil uji hipotesis tentang pengaruh faktor-faktor terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat penulis, maka tujuan yang ingin dicapai ialah:

1. Untuk menganalisis pengaruh system pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh intellectual capital terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap kapabilitas kerja.
4. Untuk menganalisis pengaruh intellectual capital terhadap kapabilitas kerja.
5. Untuk menganalisis pengaruh kapabilitas kerja terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.
6. Untuk menganalisis pengaruh system pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan kapabilitas kerja

sebagai variabel mediasi.

7. Untuk menganalisis pengaruh intellectual capital terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan kapabilitas kerja sebagai variabel mediasi.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan teori tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, sebagai acuan dan pedoman bagi penelitian di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat menambah informasi dalam pengambilan keputusan untuk sebuah daerah.

